

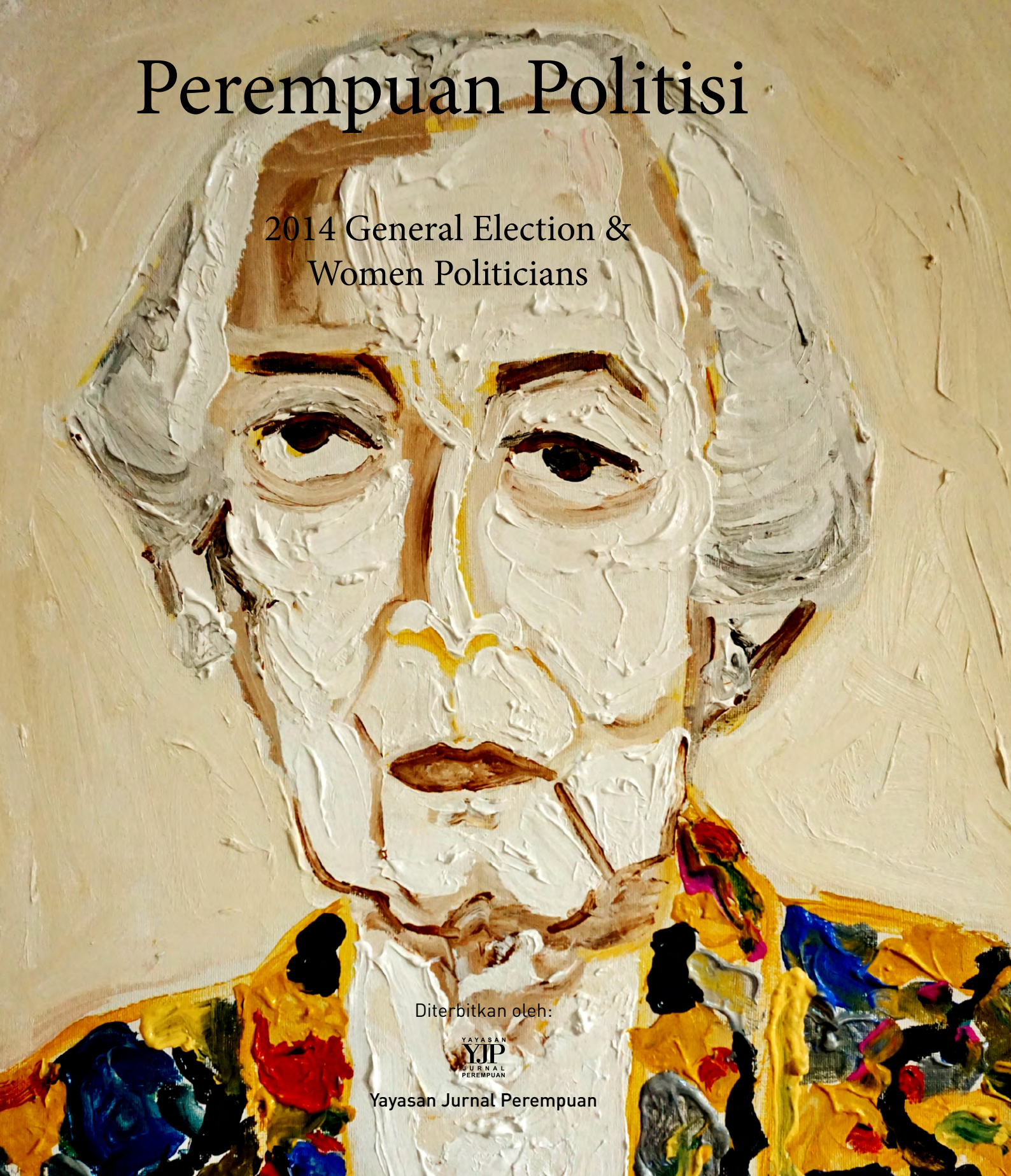
Perempuan Politisi

2014 General Election &
Women Politicians

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

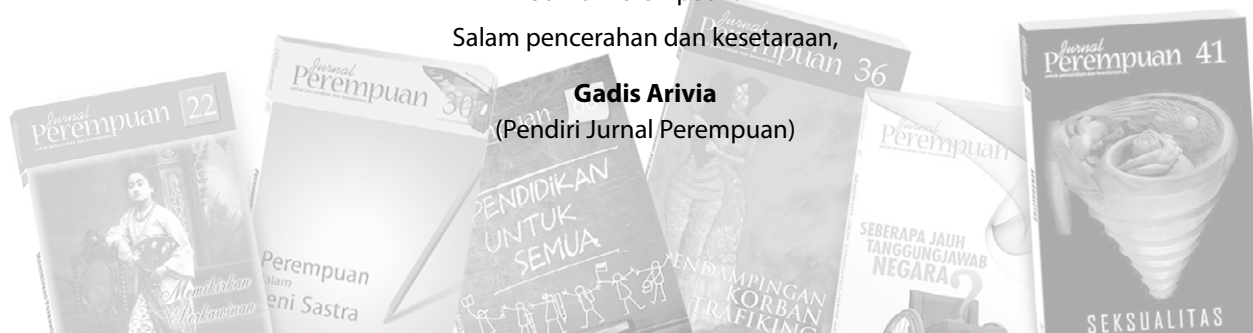
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"	iii-iv
Artikel / Articles	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i>	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i>	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i>	103-115
<i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i>	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i>	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i>	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i>	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
Wawancara / Interview	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i>	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	165-166
Profil / Profile	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja?	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i>	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

“Kursi”

Pemimpin Redaksi melukis “Kursi” untuk perempuan dalam sampul wajah *Jurnal Perempuan* Edisi 81 kali ini dengan akrilik di atas kanvas berukuran 60x90 cm. Transformasi kata “kursi” sebagai sebuah metafora memiliki makna penting bagi perempuan apabila dikaitkan dengan “kekuasaan”. Rata-rata perempuan menempati “kursi” parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18,2 persen. Data KPU 2014 menunjukkan hanya sekitar 747 perempuan dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya 1718 perempuan bukan merupakan kader partai (merupakan agregasi dengan latar belakang pengusaha, swasta, profesional, artis, selebriti, aktivis, dinasti politik, dan lain-lain). Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada Maret 2013 ini diungkapkan pelbagai penelitian bagaimana strategi

kenegaraan banyak menemu kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep kewarganegaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual—dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Dus, jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarga-negaraannya oleh negara. Dus, jamak pula apabila peradaban kita minim perempuan politisi.

Membongkar konsep kewarganegaraan yang maskulin membutuhkan analisis yang kompleks dan tidak parsial. *Stereotype* dan ketidaksetaraan telah berkembang dan tumbuh menjadi sistem tersendiri. Inisiatif untuk membongkar ini adalah jangka panjang dan memakan waktu lebih dari beberapa dekade. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini: 1) merujuk pada komitmen internasional; 2) representasi kuota dan langkah afirmatif bagi kuota perempuan di par-lemen dan legislatif; 3) reformasi legislatif dalam menjaga kesetaraan hak antara laki-laki, perempuan dan minoritas seksual;

4) aksi afirmasi untuk mengatasi dis-paritas gender dalam politik, terutama partai politik. Karena partai politik adalah penjaga gawang demokrasi, maka perlu diusahakan ketiga perihal berikut dalam partai politik: 4a) kuota voluntir untuk partisipasi perempuan dalam struktur partai politik; 4b) *Outreach* partai politik pada pemilih perempuan; 4c) memperkuat dialog publik dan dialog antar dan inter-partai. 5) Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi

politik, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut: 5a) kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan; 5b) monitoring gender pada arus politik: bagaimana kualitas laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warga-negara; 5c) mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi; 5d) bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik; 5e) mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media. Dan lain-lain. Kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil. **(Dewi Candraningrum)**

Baiq L.S.W. Wardhani, FISIP Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Mulyorejo, Jawa Timur 60115. Telp. : (031) 5914042

Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma *Inclusive Citizenship*

Status of Women as Citizen in the Paradigm of *Inclusive Citizenship*

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 81-91, 39 daftar pustaka.

Political arena has witnessed the masculinization of women's role in the public. The tendency to give the public to men has made women unable to express their ideas in full engagement as equal citizen. Involving back women into the discourse of the state is a form of defeating the myth that women are irresponsible citizens. Irresponsibility of women is the reversal effect of political exclusion of female's voices under the regimentation of male-based polity. This paper will investigate the status of women specifically under the paradigm of active and inclusive citizenship.

Keywords: citizenship status, women, inclusive citizenship, Africa, Indonesia.

Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisional relasi gender. "Ketidakbertanggungjawaban" perempuan dalam ruang publik merupakan konsekuensi dari tidak diakuiannya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem patriarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif.

Kata kunci: status kewarganegaraan, perempuan, kewarganegaraan inklusif, Afrika, Indonesia.

Partini, FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia. Telepon: +62 (0)274 548510 (Hunting), Fax: +62 274 563212

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia

Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 93-101, 14 daftar pustaka.

Women's participation in politics is the manifestation of the citizenship right fulfillment. Women as well as vulnerable groups as citizens have the right to improve their existence in politics. The rights that attach to women as citizens hopefully can make them not only as the vote-getter or political parties' participants but also as those being elected and exercise policy. Politic is genderless but politic system is constructed mostly by men. And women are lacking confidence within this culture of politic. It then deteriorates the stigma that women are unable and having no capacity to compete with men. Although women are legal citizens but the culture of politic is neither friendly to women nor conducive to feminine traits. The electoral process in citizenships system hopefully does not only create the man-represented view, but also a transformation process between the political party and the women platform.

Keywords: political participation, citizenship, discrimination.

Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai Warga Negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol, sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain. Politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik dikonstruksi secara maskulin. Ini menguatkan stigma bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki. Budaya politik belum kondusif, belum ramah perempuan meski perempuan sebagai warga negara yang sah. Proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana keterwakilan, tetapi sebuah proses transformasi antara parpol dan perempuan.

Kata kunci: partisipasi politik, kewarganegaraan, diskriminasi.

Shelly Adelina & Ani Soetjipto, Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia. Gedung Rektorat UI, Lantai IV, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya no. 4 Jakarta 10430, telp: 021-3160788, 021-3907407, faks. 021-3907407

Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender

Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 103-115, 4 tabel, 21 daftar pustaka.

Analysis of the gender strategy in the three largest political parties which dominate the legislative period 2009-2014, namely the Democratic Party, the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows several findings that can be reflected to travel to face election. First, third parties accounted for the most number of women seats in the national parliament. Second, as the dominant parties through the fractions in the legislature, three showed no provisions regarding how the policies and strategies of political parties in efforts to achieve gender equality and gender mainstreaming strategies not found in political parties. Third, strategies that are present in the party institutions only tangible Department of Women as women focal point. Beyond that, the strategy of increasing the representation of women is based on justice, equality, and gender equity was absent.

Keywords: gender mainstreaming strategy, politics interest, political parties, representation of women.

Analisis tentang strategi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi Pemilu. Pertama, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. Kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender, dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik. Ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. Di luar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen.

Kata kunci: kepentingan politik, strategi pengarusutamaan gender, partai politik, representasi perempuan.

Aditya Perdana. Faculty of Economics & Social Science Univ Hamburg dan FISIP Univ Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik

Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 117-127, 3 tabel, 19 daftar pustaka.

This article describes how seven female activists from civil organizations participate in 2004 and 2009 elections. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article unearths women's representation movement based on the actors' experiences to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that women activists, who participated in two elections, have contributed to implement women's representation into their political parties and parliament.

Keywords: female activists, legislative, party, region.

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak Pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterwakilan perempuan berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di partai politik mereka dan parlemen.

Kata kunci: aktivis perempuan, legislatif, partai, daerah pemilihan.

Nuri Soeseno. Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif

Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 129-143, 3 tabel, 21 daftar pustaka.

Women's representation in parties and legislative institution is closely related to Indonesian's party typology as office seekers. It charted descriptive mandate to fulfill 30% quote of women's representation in General Election 2014—not necessary representing women's critical agenda. The phenomena of female legislators working previously as celebrities, actress, singers, or coming from political dynasty is the consequence of office seekers parties. It does not then guarantee the promotion, empowerment and protection of women's critical issues in societies as they are not representing women in general substantively. It is necessary to create female critical actors coming to office in political parties to succeed feminist agenda.

Keywords: female politician, party, general election, descriptive and substantive representation.

Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office seekers'. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif: untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam Pemilu 2014. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik, dll merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga-lembaga politik (partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif.

Kata kunci: perempuan politisi, partai, pemilu, keterwakilan deskriptif dan substantif.

Any Sundari. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta. Jl. Jambon 4 No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241

Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta

Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 145-151, 1 gambar, 5 daftar pustaka.

Women's participation in politics is a crucial discourse in Indonesia. Affirmative action policy by providing 30% quota for women in parliament is a positive thing enforcing women to enter into political contestation. However, encouraging women to engage in politics is not easy task. Politics from the outset has been identified as a distinctive world of men and women experienced constant domestication systematically orchestrated by the state. *Ibuisism* ideology caused women to experience a variety of vulnerabilities and bundle of violences in formal politics. To revive women politically especially at the community level, women can learn to negotiate outside of formal politics to voice their representation.

Keywords: female politics, participation, community.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan diskursus penting di Indonesia. Kebijakan afirmatif kuota 30% kepada perempuan di parlemen merupakan hal positif guna mendorong perempuan berkontestasi. Namun, mendorong perempuan untuk berpolitik bukanlah perkara mudah. Politik sejak awal sudah diidentikkan sebagai dunia yang laki-laki dan negara secara sistematis melakukan domestifikasi perempuan dalam rumah. Ideologi *ibuisme* ini membawa perempuan mengalami berbagai kerentanan kekerasan dan menumpulkan potensi perempuan untuk berpolitik. Karena hal ini maka dibutuhkan kerja-kerja pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi dan berpolitik di luar politik formal parlemen.

Kata kunci: politik perempuan, partisipasi, komunitas.

Elisabeth Anita Dhewy Haryono. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?

How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 153-160., 1 gambar, 2 tabel, 4 daftar pustaka

The decreasing number of votes for female legislative candidates for DPR RI in 2014 General Election aroused an urgent question related to the commitment of political parties to encourage female representatives in the parliament. The 2014 Election result showed that, so far, political parties only adopted the affirmative policy in the level of legal-formal. Practically, even though they had implemented the minimum quota of female representation in the candidacy, this policy was not followed up by the internal policy in the political party to earnestly support the quota for female representation. Therefore, the internal political party transformation was needed and was urgent to be done, both for its structural and cultural level.

Keywords: Female parliament, candidate, 2014 general election

Menurunnya jumlah kandidat legislatif perempuan di DPR RI 2014 pada Pemilu membutuhkan perhatian dan komitmen dari partai politik agar meningkatkan keterwakilannya. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Secara praktik meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan, tetapi tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik yang mendukung kepemimpinan perempuan. Dus, transformasi kebijakan dalam internal partai politik dibutuhkan untuk perubahan budaya dan struktural yang lebih ramah gender.

Kata kunci: perempuan parlemen, caleg, Pemilu 2014

Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik

Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations

Aditya Perdana

Faculty of Economics & Social Science Univ Hamburg dan FISIP Univ Indonesia
Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

adperd@yahoo.com

Naskah Diterima 22 Januari 2014. Direvisi 12 Februari 2014. Disetujui: 7 April 2014

Abstract

This article describes how seven female activists from civil organizations participate in 2004 and 2009 elections. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article unearths women's representation movement based on the actors' experiences to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that women activists, who participated in two elections, have contributed to implement women's representation into their political parties and parliament.

Keywords: female activists, legislative, party, region.

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak Pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterwakilan perempuan berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di partai politik mereka dan parlemen.

Kata kunci: aktivis perempuan, legislatif, partai, daerah pemilihan.

Pendahuluan

"Capek juga ya berada di luar". Kalimat inilah yang muncul dari dua anggota DPR perempuan periode 2009-2014, Hetifah Sjaifudian (Golkar) dan Eva Kusuma Sundari (PDIP) untuk menanggapi alasan mereka masuk ke partai politik. Keduanya adalah aktivis LSM yang telah sepenuhnya beralih menjadi politisi dan berhasil memenangkan kursi DPR tahun 2009 lalu. Bagi mereka, puluhan tahun berkecimpung dalam mengawal kebijakan negara dan mengadvokasi isu dan kepentingan kelompok masyarakat marginal tidaklah serta merta memuaskan akan adanya perubahan struktur kebijakan yang lebih baik. Sementara itu, para politisi yang ada belum mampu melakukan dan mendorong perubahan yang substantif di DPR. Karena keterbatasan peran

masyarakat sipil dalam ranah politik formal seperti DPR, maka keputusan Hetifah dan Eva (dan juga banyak aktivis LSM lainnya) untuk berpindah peran sebagai politisi perlu mendapat apresiasi tinggi. Salah satu dukungan terhadap keputusan ini adalah para aktivis masyarakat sipil yang memiliki kemampuan teknokratis dalam pemberdayaan masyarakat dianggap mampu berkontribusi untuk perubahan lebih baik di lembaga politik seperti DPR dan partai politik. Di samping juga, kehadiran aktivis masyarakat sipil di DPR dan partai politik dapat mengakselerasi lemahnya fungsi representasi dari kepentingan publik ke dalam pembuatan kebijakan.

Jumlah perempuan di DPR telah meningkat dari 11 persen (2004) menjadi 18 persen (2009). Angka tersebut adalah sebuah konsekuensi dari usaha gerakan perempuan untuk meningkatkan jumlah

keterwakilan perempuan di DPR yang dilakukan sejak tahun 2002. Adapun secara legal (untuk pemilu 2004 dan seterusnya), kuota perempuan sebanyak 30 persen adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam nominasi di setiap daerah pemilihan (dapil). Namun demikian, apakah usaha pemenuhan kuota 30 persen tersebut mampu menghasilkan kualitas produksi perundang-undangan di DPR yang lebih baik? Lalu siapakah yang berhasil mengisi kursi perempuan tersebut: perempuan yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni ataukah perempuan yang sekadar populer di dapil tanpa memiliki konsep dalam mewakili konstituennya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah refleksi dari implementasi kuota 30 persen namun hasil nyata perubahan dalam berbagai legislasi di DPR yang lebih berpihak kepada masyarakat luas dan khususnya kelompok perempuan belum teruji. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menjawab sebuah tantangan tentang apakah aktivis perempuan yang dianggap memiliki kompetensi dalam pengembangan sosial kemasyarakatan mampu berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif di tingkat nasional. Di samping itu, seberapa besar kontribusi para aktivis perempuan ini melakukan perubahan-perubahan sosial dan politik, terutama dalam isu gender, di masing-masing partai dan DPR. Untuk menjawab pertanyaan studi ini, artikel ini akan mengeksplorasi konsep keterwakilan perempuan dalam perspektif kelembagaan, dilanjutkan dengan narasi pengalaman tujuh aktivis perempuan dalam pemilu 2004 dan 2009, kemudian merefleksikan pengalaman tersebut untuk menghadapi pemilu 2014 dan yang akan datang serta ditutup dengan sebuah agenda yang bisa dilakukan secara bersama oleh gerakan perempuan.

Tabel 1. Daftar Wawancara

No	Nama	Institusi/afiliasi	Tanggal wawancara dan lokasi
1	Hetifah Syaifudian	Golkar	12 Februari 2012 di Jakarta
2	Binny Buchori	Golkar	14 Februari 2012 di Jakarta
3	Ratna Batara Munti	PDIP/ LBH APIK	17 Februari 2012 di Depok
4	Dini Mentari	PPP/ PATTIRO	23 Februari 2012 di Jakarta
5	Eva Kusuma Sundari	PDIP	1 Maret 2012 di Jakarta

6	Eko Bambang Subiantoro	Aktivis perempuan/ Konsultan Polmark	12 Maret 2012 di Jakarta
7	Ani Sucipto	Universitas Indonesia	14 Maret 2012 di Depok
8	Sri Budi Eko Wardani	PUSKAPOL UI	25 Maret 2012 di Depok
9	Ratu Dian Hatifah	Golkar/ Ketua Umum KPPI	26 Maret 2012 di Depok
10	Nursyahbani Katjasungkana	LBH APIK/ PKB	12 April 2012 di Den Haag Belanda

Keterwakilan Perempuan

Dalam usaha mendapatkan akses politik dan jabatan politik, del Campo (2005: 17-19) mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan berdasarkan pengalaman Amerika Latin. Pertama, partai politik dapat diasumsikan sebagai “bottle necks” dimana rekrutmen politik dan seleksi kandidat menyulitkan perempuan. Kedua, perempuan menghadapi keterbatasan akses dan keterbatasan dalam memengaruhi posisi “high-level” politik manakala adanya keterbatasan otoritas pemerintahan. Ketiga perempuan di partai politik memiliki masalah kelembagaan internal manakala jumlah dan posisi mereka adalah minoritas. Keempat, perempuan sadar kalau keterbatasan kelembagaan mereka karena laki-laki mendominasi setiap diskusi dalam pembuatan dan pemantauan terhadap aturan partai, sementara perempuan hanya mengikuti aturan tersebut. Kelima, perempuan tidak memiliki pengaruh kuat di media. Dan terakhir, resistensi keluarga dan juga lingkungan patrimonial adalah persoalan kultural yang dihadapi perempuan dalam berpolitik. Kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan ini tidak hanya terjadi di wilayah Amerika Latin yang memiliki hubungan patron-klien yang kuat tetapi juga hadir di negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, promosi hak perempuan dalam arena politik formal (Franceschet, 2001) harus dapat dilindungi oleh hukum serta regulasi lainnya untuk menghindari berbagai kesulitan yang disebutkan di atas.

Diperkenalkan oleh Hanna Pitkin di tahun 1967, konsep representasi politik adalah salah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan. Perspektif Pitkin ini mendefinisikan ada empat dimensi dalam keterwakilan politik yaitu formal, deskriptif, substantif dan simbolis seperti berikut (Tremblay, 2008: 2-3):

symbolic representation, which embodies an idea or an entity (e.g., a flag or a king represents the nation); formal representation, which refers to institutional rules and procedures by which representatives are designated (i.e. the electoral regulation and the voting system); descriptive representation, which refers to the similarities and differences between representatives and the represented; and substantive representation, which evokes the activities of representation (more specifically the responsiveness of representatives to the represented).

Schwindt-Bayer membangun konsep ini dalam sebuah model integrasi tentang keterwakilan perempuan yang dilihat dari tiga cara (Schwindt-Bayer & Mishler, 2005: 412-4, Schwindt-Bayer, 2010: 7). Pertama, representasi formal memengaruhi representasi deskriptif yakni aturan pemilu dan regulasi lainnya yang menjelaskan bagaimana pemilu bekerja dan memiliki efek yang kuat terhadap badan perwakilan berdasarkan keragaman ideologi di dalam masyarakat. Kedua, formal dan deskriptif representasi memengaruhi representasi substantif manakala berdasarkan aturan pemilu, keterwakilan dapat menghasilkan insentif untuk berbuat sesuatu kepada konstituen mereka dengan beragam cara. Hasilnya adalah lembaga legislatif, yang digambarkan sebagai cermin dari keragaman masyarakat dan menawarkan berbagai kesempatan untuk mewakili kepentingan masyarakat. Ketiga, formal, deskriptif dan substantif representasi ditransformasikan sebagai cara pemilih melihat pemerintahan. Sebagai contoh kelompok yang tidak terwakili akan memiliki kesempatan besar di dalam pemerintahan jika ada aturan pemilu yang dapat menentukan bagaimana jenis keterwakilan di lembaga legislatif, jika ada anggota DPR yang berpengaruh dan mewakili kepentingan kelompok tertentu, dan jika lembaga legislatif menyediakan perundang-undangan yang konsisten untuk mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas.

Artikel ini mengaplikasikan dimensi kedua (formal dan deskriptif representasi memengaruhi representasi substantif) untuk menilai implementasi dari keterwakilan perempuan di parlemen dan makna refleksi untuk isu perempuan lainnya. Dalam konteks ini, Tremblay (2007: 539) mengilustrasikan pentingnya faktor politik seperti struktur negara, parlemen, kepartaian dan sebagainya, yang memengaruhi usaha perempuan untuk memperoleh

akses kuasa politik. Meskipun artikel ini sepenuhnya memerhatikan kelembagaan sistematis (Krook 2006) yaitu kelembagaan formal (partai politik dan sistem pemilu) dalam sistem politik untuk menganalisis keterwakilan perempuan, namun demikian aspek informal dalam berbagai kebijakan rekrutmen politik dan seleksi kandidat di partai (Cheng & Tavits, 2009) juga patut dipertimbangkan. Oleh karenanya artikel ini berpendapat bahwa implementasi keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat dilihat dari perjuangan kandidat perempuan (dalam hal ini aktivis perempuan) untuk memenangkan kursi di parlemen dan kemampuan kandidat terpilih mendorong perubahan substansial dalam kebijakan untuk perempuan.

Tulisan ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pengalaman para aktivis perempuan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai tentang isu gender dan politik dalam arena politik baru mereka yaitu pemilihan umum. Pengalaman ini menjadi penting sebagai ajang sarana refleksi dan membangun agenda bersama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di berbagai sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan teknik wawancara mendalam dalam metode studi kasus (Gerring, 2007). Adapun para narasumber dalam studi ini adalah para aktivis perempuan di kelompok NGO, partai politik dan akademisi yang telah diwawancarai pada tahun 2012. Dalam menganalisis hasil wawancara, tulisan ini menggunakan metode melacak proses (*process tracing*) (George & Bannett, 2005) dengan memerhatikan berbagai kejadian, aktivitas, serta persepsi dari para aktor yang dilengkapi oleh data pelengkap seperti artikel jurnal, berita, dan informasi terkait lainnya.

Meraih Kekuasaan Politik

Terdapat empat hal utama dalam mendiskusikan bagaimana aktivis kelompok perempuan ikut serta dalam kompetisi pemilu tahun 2004 dan 2009: variasi latar belakang sosial, motivasi, ambisi kekuasaan perempuan, dan dampak posisi politik perempuan.¹ Latar belakang sosial mendiskusikan tiga hal yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan kapabilitas personal serta ikatan-ikatan sosial lainnya. Sementara itu, motivasi dalam politik dan mengapa perempuan memutuskan pilihan politik adalah penjelasan dari indikator motivasi. Ambisi kekuasaan perempuan lebih dilihat sebagai kapasitas dan pengalaman para perempuan dalam sukses pemilu dan kemampuan bekerjasama dengan struktur

partai. Terakhir, dampak posisi politik perempuan menghadirkan para perempuan dari kelompok gerakan mampu memengaruhi partai politik mereka dan melakukan perubahan dalam agenda pengarusutamaan gender di partai politik. Adalah tujuh perempuan yang memiliki latar belakang yang hampir sama yaitu aktivis gerakan perempuan (lihat tabel 1). Mereka dipilih berdasarkan variasi pengalaman dalam mengikuti pemilu, sukses dan gagal dalam memenangkan kursi, serta pertimbangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPR.

Tabel 2
Aktivis Perempuan dalam Pemilu 2004 dan 2009

NO	Nama	Asal kelompok	Partai politik	Terpilih/tidak terpilih
1	Dr. Hetifah Sjaifudian	AKATIGA Bandung (NGO anggaran)	Golkar	Terpilih dalam Pemilu 2009
2	Eva Kusuma Sundari	Konsultan NGO dan mantan dosen di Universitas Airlangga	PDI-P	Terpilih dalam Pemilu 2004 (pengganti) dan 2009
3	Ratna Batara Munti	LBH APIK (NGO dalam isu kekerasan perempuan)	PDI-P	Tidak terpilih dalam Pemilu 2009
4	Dini Mentari	PATTIRO (NGO dalam isu partisipasi publik dan anggaran)	PPP	Tidak terpilih dalam Pemilu 2004 dan 2009
5	Nursyahbani Katjasungkana	KPI (gerakan perempuan)	PKB	Terpilih sebagai anggota MPR tahun 1999, terpilih dalam Pemilu 2004 dan tidak terpilih dalam Pemilu 2009
6	Binny Buchori	PRAKARSA (NGO dalam isu keadilan dan kesejahteraan)	Golkar	Tidak terpilih dalam Pemilu 2009
7	Ratu Dian Hatifah	IPPNU, Fatayat NU (organisasi massa)	Golkar	Tidak terpilih dalam Pemilu 2004 dan 2009

Sumber: kompilasi hasil wawancara penulis pada tahun 2012.

Ketujuh perempuan ini memegang gelar sarjana dan pascasarjana dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan di luar negeri. Di samping pendidikan formal, mereka juga pernah mengenyam berbagai pendidikan tambahan (di dalam dan luar negeri) serta workshop untuk memperkaya kerja sosial mereka. Para kandidat perempuan dalam studi

ini juga memiliki keragaman dalam pengalaman kerja dan interaksi dalam politik praktis. Namun demikian, sebagian besar diantara mereka adalah para advokat dan teknokrat dalam kebijakan sosial serta isu gender dalam pembangunan. Nursyahbani dan Binny adalah dua di antara para perempuan ini yang memiliki pengalaman panjang sejak tahun 1990an dalam mengawal advokasi berbagai isu-isu gender dan pembangunan sosial. Dini dan Hetifah dikenal dalam keterlibatan aktif mereka di isu tata kelola pemerintahan lokal. Eva dan Ratna memiliki pengalaman dalam isu pemberdayaan perempuan serta anti kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, Ratu Dian meski tidak terlibat aktif dalam aktivitas NGO, ia telah melakukan hal yang tidak berbeda dalam pemberdayaan isu perempuan dalam organisasi massa seperti NU dan sayap perempuan PKB. Oleh karenanya para perempuan ini memiliki kemampuan yang memadai dalam berinteraksi dengan politisi, birokrat serta kelompok masyarakat lainnya dalam mengadvokasi kebijakan.

Sementara itu, relasi dan ikatan organisasi sosial dan politik yang dimiliki oleh ketujuh perempuan ini pun bervariasi. Eva memiliki hubungan politik yang kuat dengan GMNI, dimana organisasi ini turut mendirikan PDIP pada masa awal. Ratu Dian juga memiliki keterikatan dengan organisasi pelajar di NU serta organisasi perempuan Fatayat NU yang juga memiliki ikatan dengan PKB. Namun demikian, ketika Ratu Dian memilih pindah ke Golkar, relasi NU tidaklah begitu mendominasi di partai tersebut. Dini memiliki ikatan yang kuat dengan para alumni ITB yang berada di PPP. Sementara itu, Nursyahbani dan Binny memiliki ikatan kultural dan personal yang kuat dengan PDIP, dimana kedua almarhum ayah mereka adalah anggota PNI dan loyalis Sukarno. Namun sayangnya, keduanya memilih berbeda partai politik dengan ayah mereka yaitu Nursyahbani memilih PKB dan Binny bekerja untuk Golkar.² Faktor ikatan organisasi sosial dan politik tersebut juga memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan partai politik dari para perempuan ini.

Sementara itu dalam indikator motivasi, ketujuh perempuan ini memiliki alasan dalam pilihan berpolitik karena refleksi personal dan penilaian yang mendalam dari hasil pekerjaan sosial yang telah mereka lakukan. Di samping itu, refleksi mereka tampaknya seragam bahwa ketertarikan untuk terjun di dunia politik praktis sekarang karena kurangnya politisi yang progresif di DPR. Menurut mereka, LSM tidak cukup hanya mendorong perubahan sosial

dan politik dari luar pemerintahan dan keterbatasan dalam melakukan apa yang diinginkan oleh para aktivis LSM tersebut. Motivasi lainnya adalah kesempatan politik dalam kerangka reformasi politik dan deliberasi pengarusutamaan gender dalam politik yaitu kuota perempuan dalam parlemen sejak tahun 2003. Para perempuan ini telah sadar bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tentu dibutuhkan banyak perempuan yang mumpuni dan potensial untuk mengisi kursi parlemen tersebut. Pemimpin partai politik seperti Abdurrahman Wahid, Jusuf Kalla, dan Akbar Tanjung telah mengundang beberapa kandidat perempuan, seperti Nursyahbani, Binny dan Ratu Dian, secara personal untuk berpartisipasi dalam partai politik dan pencalonan. Terakhir motivasi dalam mencari kenyamanan dalam berpolitik juga penting. Beberapa perempuan secara gamblang menyebutkan bahwa preferensi pilihan partai politik yang didasari oleh pertimbangan yang rasional dan juga adanya ikatan-ikatan sosial dan politik seperti keluarga, alumni, etnis, dan lainnya juga penting. Bagi mereka, memilih partai yang memiliki kesamaan nilai dan visi serta pengorganisasian yang solid dalam menjalankan program adalah alasan dalam menjatuhkan pilihan politik mereka. Indikator ketiga, jalur ambisi kekuasaan perempuan dapat dilihat dalam tiga hal untuk menganalisis kandidat perempuan dalam pemilu yaitu masalah yang dihadapi dalam seleksi kandidat, manajemen kampanye para kandidat, dan terakhir masalah internal partai yang memengaruhi proses pemilu mereka. Indikator ini sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana para kandidat perempuan tersebut melakukan negosiasi dengan tim kampanye dan partai politiknya untuk memenangkan kursi DPR. Tabel di bawah adalah kandidat perempuan dengan data daerah pemilihan dan nomor urutnya.

Tabel 3
Aktivistis Perempuan dan Data Pemilu

No	Nama Kandidat	partol	Pemilu 2004		Pemilu 2009	
			Nomor Urut	Dapil	Nomor Urut	Dapil
1	Dr. Hetifah Sjaifudian	Golkar	-	-	2	Kalimantan Timur
2	Eva Kusuma Sundari	PDI-P	3	Jawa Timur 5	3	Jawa Timur 6
3	Ratna Batara Munti	PDI-P	-	-	3	Jawa Timur 7
4	Dini Mentari	PPP	9	Jawa Barat 2	3	Jawa Barat 2
5	Nursyahbani Katjasungkana	PKB	2	Jawa Timur 2	1	Jawa Timur 3
6	Binny Buchori	Golkar	-	-	2	Yogyakarta
7	Ratu Dian Hatifah	Golkar	6	Banten 2	3	Banten 3

Sumber: wawancara penulis tahun 2012

Dalam jalur pertama, masalah dalam seleksi kandidat, beberapa perempuan ikut serta dalam pemilu 2009 untuk pertama kali, sementara yang lain telah berpartisipasi sejak tahun 2004. Hanya satu kandidat yang mampu berjuang di dapil yang sama dalam dua pemilu, sementara yang lain tidak mampu mempertahankan pemilihan dapilnya. Di jalur ini akan diulas sedikit bagaimana setiap partai melakukan seleksi kandidat berdasarkan pengalaman masing-masing perempuan tersebut. Meskipun para kandidat perempuan mampu mendorong tindakan afirmasi kepada partainya, setiap kandidat memiliki kesulitan dalam memenangkan kursi di dalam setiap dapil karena adanya lokal elite dan pemimpin lokal yang juga bertarung di dapil tersebut. Di Golkar, panitia seleksi kandidat memberi kesempatan kepada Hetifah, Ratu Dian, dan Binny untuk memilih dapil potensial mereka. Hetifah menolak ditempatkan di Bandung karena ia tahu banyak tentang kontestasi politik lokal di sana. Hetifah memilih ditempatkan dapil yang tidak familiar buatnya, Kalimantan Timur, karena ia yakin bahwa kandidat perempuan lainnya dari Golkar juga memiliki peluang yang sama dalam memperebutkan kursi dari dapil ini. Padahal dapil Kaltim ini merupakan lumbung suara Golkar dan perempuan Golkar dari Jawa dan Jakarta tidak berminat untuk ditempatkan di daerah ini. Sementara itu, Binny meminta untuk ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, dapil yang ia kenal lama dan ia memiliki basis dukungan yang

jelas. Sayangnya, kolega Binny di partai menyatakan bahwa dapil tersebut telah didominasi salah seorang elite Golkar di Jakarta selama beberapa dekade sehingga akan menyulitkan bagi Binny. Oleh karenanya, Binny memilih Yogyakarta dimana ia menyelesaikan kuliahnya di sana. Dapil Yogyakarta tidak memiliki basis pendukung yang kuat dan hanya memungkinkan satu kursi untuk DPR RI dan Binny ditempatkan dalam nomor urut dua, di bawah pemimpin lokal Golkar di sana. Ratu Dian ditempatkan di salah satu dapil di Banten, sebuah provinsi yang dikenal dengan dominasi dinasti keluarga lokal. Di seluruh dapil Banten, Golkar hanya memperoleh empat kursi dari 22 kursi DPR di dua pemilu. Ratu Dian ditempatkan di nomor urut enam dan tiga dalam pemilu 2004 dan 2009.

Di PDIP, meskipun Eva dan Ratna diberikan ruang dalam memiliki dapil pilihan mereka sendiri serta nomor urut yang diinginkan, tetapi panitia seleksi tetap memutuskan secara sentralistis. Dalam pemilu 2004, Eva ditempatkan di Jawa Timur 5, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, dimana di dapil ini Eva diasumsikan oleh panitia seleksi memiliki "die hard voters" yang akan mendukung secara penuh dalam kemenangan pemilu. Eva sadar bahwa kompetensinya dalam melakukan pengorganisasian program pembangunan di Malang telah dikenal di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah. Sementara itu, Ratna merasa beruntung ditempatkan di dapil Jawa Timur 7 dalam Pemilu 2009 karena ia merasa dalam memilih dapil tidak mengeluarkan uang sedikit pun dibandingkan para kandidat lainnya. Dapil ini termasuk daerah yang memiliki pendukung lumayan bagi PDIP. Ratna yang baru bergabung dengan PDIP sejak tahun 2008 dan telah berkontribusi dalam memiliki kandidat perempuan potensial untuk PDIP diminta oleh elite PDIP untuk membantu kemenangan di dapil tersebut. Sayangnya, Eva dan Ratna ditempatkan dalam nomor urut tiga dimana PDIP tetap memprioritaskan senioritas kandidat di setiap dapil.

PPP dan PKB menggunakan proses seleksi yang hampir sama dengan partai lainnya, menurut Dini dan Nursyahbani, dimana sentralisasi dalam penentuan caleg dalam setiap dapil. Kedua partai ini juga mempertimbangkan asal daerah dan etnis dan kandidat perempuan untuk ditentukan dalam dapil mana yang sesuai. Dini ditempatkan di nomor sembilan dan nomor tiga dalam pemilu 2004 dan 2009 di dapil kabupaten Bandung dimana PPP tidak memiliki suara yang kuat dalam memperoleh

suara yang signifikan. Sementara itu, Nursyahbani ditempatkan di nomor dua dan nomor tiga di dapil Jawa Timur 2 dan Jawa Timur 3 dalam pemilu 2004 dan 2009. Dalam pemilu 2004, Nursyahbani terpilih sebagai anggota DPR karena di PKB memiliki pendukung yang signifikan di dapil tersebut. Sementara itu, dalam pemilu 2009, ketatnya pertarungan dalam memperebutkan kursi sebagai konsekuensi pemilu yang lebih terbuka membuat para kandidat perempuan, termasuk Nursyahbani dan Dini, sulit untuk menang meskipun posisi nomor urut lebih baik dari sebelumnya. Dalam jalur kedua dan ketiga yaitu manajemen kampanye para kandidat perempuan dan masalah internal partai yang terkait dengan proses pemilu menunjukkan bagaimana para kandidat perempuan harus mampu bertahan dalam kompetisi pemilu secara mandiri. Para kandidat perempuan ini menyadari bahwa perubahan sistem pemilu 2009 dari proporsional representasi dengan daftar tertutup menjadi daftar terbuka telah menghancurkan rencana strategis mereka dalam kemenangan kursi DPR. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi melegalkan sistem baru tersebut, para caleg perempuan ini mengikuti instruksi partainya untuk bekerjasama dengan kolega laki-laki di setiap dapil untuk memastikan kemenangan kursi bagi partainya, bukan untuk individu. Sejak keputusan itu diterapkan pada awal 2009, kompetisi bebas antar caleg tak bisa dihindari. Maka bagi kandidat yang bertarung dalam dua pemilu, perubahan sistem tersebut diakui oleh mereka telah menyulitkan untuk memenangkan kursi, terutama makin mahal biaya pengeluaran kampanye. Seperti yang disampaikan oleh Eva berikut ini:

"pengalaman saya di tahun 2004 lebih mudah dibandingkan tahun 2009. [di tahun 2004] saya adalah anggota baru. Karena adanya peringkat dalam nomor, maka biaya politiknya sangat rendah. Saat itu, kami [yang berada di nomor urut atas] bertemu untuk [menentukan] Eva ambil [dapil] ini dan Pramono [salah satu elite PDIP] ambil daerah lainnya. Orientasi kami adalah memperoleh suara. Saya menghabiskan Rp.225 juta, dimana Rp.75 juta saya serahkan kepada partai dan sisanya saya pergunakan untuk kampanye saya. Saya mendapat 36.000 suara".
"ketika suara terbanyak diputuskan [di tahun 2009], mati aku! Saya mengeluarkan lebih dari Rp.1 miliar. Dapilku dipindah

ke Kota Kediri [dimana sebelumnya di Malang]... Ya, akhirnya saya beruntung karena mengandakan keluarga besar ibuku dari Tulangagung [dekat Kediri]. Aku maksimalkan dukungan keluarga ini dan jaringan kultural lainnya.”

Sementara itu, Ratna, caleg dari PDIP, berbagi pengalaman sulitnya bertarung dalam sistem pemilu yang lebih terbuka. Apalagi banyak kandidat yang lebih mementingkan politik uang dalam memenangkan suaranya. Berikut komentar Ratna:

“jika tidak ada keputusan MK, saya sangat mungkin untuk menang karena saya ditempatkan di dapil Jatim 7 yang dikenal dapil strategis bagi PDIP yaitu dapil “merah” dan “basah”. Sayangnya kemenangan Partai Demokrat saat itu memang luar biasa... saya menerima 26.000 suara. Itu jumlah yang luar biasa besar karena partai juga memperoleh suara yang besar. Seperti Hastu [salah satu elite di DPP PDIP], dia harus bertarung di MK untuk mendapatkan sisa suara, tapi akhirnya kalah. Ketika kami harus bertarung secara internal, kami bingung bagaimana mengalahkan kandidat yang memiliki banyak uang? Partai tidak lagi menjadi mesin politik, tapi sukses kandidat ditentukan oleh tim individu.”

Untuk memenangkan kursi DPR dalam pemilu 2009 tersebut, para kandidat perempuan ini mengorganisasikan dua tim kampanye yang berbeda: struktur partai di dapil dan tim personal. Oleh karena Pemilu 2009 meminta setiap kandidat untuk meraih suara maksimal dalam mencapai satu kursi terpilih, maka tentu saja setiap kandidat membutuhkan dua tim kampanye tersebut. Dalam konteks pemenangan kursi DPR ini, di tahun 2004 para caleg hanya mengandakan dukungan penuh dari struktur partai lokal, namun tahun 2009 kondisi tersebut tidak mungkin dilakukan. Tim personal dari setiap caleg tentu harus dimaksimalkan untuk meraih suara individual. Maka, para kandidat perempuan ini memanfaatkan dukungan dari sesama aktivis LSM dan gerakan perempuan sebagai bagian dari tim personal mereka. Namun demikian, dukungan tersebut hanya bersifat personal perorangan bukanlah kelembagaan dari organisasi perempuan atau LSM lainnya. Seperti contoh, KPI menegaskan dalam mendukung semua caleg perempuan, tidak perorangan seperti yang diharapkan oleh para kandidat perempuan.

Kalaupun ada sedikit dukungan finansial lembaga dapat dimanfaatkan dalam bentuk diskusi-diskusi di kelompok masyarakat di dapil seperti yang didapatkan oleh Ratna. Hetifah memanfaatkan dukungan jaringan NGO yang dia punya dari beberapa daerah di Bandung, Kebumen, Batam dan teman baru di Kalimantan Timur untuk membantu dalam tim personalnya. Meskipun demikian ia meyakini tim dari struktur partai juga penting, seperti yang disampaikan “mesin partai itu sudah terbangun dan dapat bekerja. Untuk daerah yang dukungan pemilihnya kuat seperti Kutai Kertanegara, sangat penting mendapat dukungan dari partai”. Indikator terakhir, dampak dari aktivitas perempuan aktivis di partai politik, dapat dilihat dari tiga hal: aktivitas mereka setelah pemilu usai, peran mereka di partai politik dalam mempromosikan kuota gender dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan isu pembangunan gender secara umum. Para aktivis perempuan ini di dalam partai politik telah melakukan berbagai rangkaian aktivitas yang disebut di atas, meski dengan dampak yang tidak bisa dilihat secara lebih luas.

Prestasi Aktivistis Perempuan di Parlemen

Beberapa kandidat perempuan yang tidak terpilih dalam Pemilu 2009 seperti Binny, Dini, Ratu Dian dan Ratna memutuskan untuk tetap berkontribusi terhadap pengembangan isu perempuan dan politik di masing-masing partai. Binny diminta untuk memimpin pusat kaderisasi partai di dewan pimpinan pusat Golkar, meskipun ini adalah pengalaman pertama di partai. Dini juga berusaha aktif di dalam PPP dengan menerima posisi sebagai wakil sekretaris jenderal untuk isu hukum dan pada saat yang sama ia juga memperluas pengembangan PATTIRO. Dini juga membangun komunikasi strategis antara kolega perempuannya di DPR dengan kelompok NGO lainnya. Dini memiliki harapan bahwa terjadi dialog yang strategis antara kelompok NGO, anggota DPR dari PPP dan juga politisi perempuan di partainya untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu perempuan. Ratu Dian memperluas jaring organisasinya dengan aktif dalam kepengurusan MKGR dan AMPI dimana keduanya adalah organisasi pendukung utama Golkar. Di samping itu, ia juga aktif dalam mengembangkan isu keterwakilan perempuan di koalisi perempuan partai politik. Sementara Ratna lebih fokus ke sayap pemuda partai dan mendukung berbagai program perempuan di PDIP.

Sementara itu, para kandidat perempuan yang terpilih seperti Eva, Hetifah, dan Nursyahbani (untuk pemilu 2004), telah mampu berkontribusi terhadap kerja mereka di parlemen. Sejak Eva terpilih sebagai pengganti anggota DPR tahun 2007, ia telah meningkatkan akses politik ke parlemen kepada berbagai NGO dan organisasi lainnya. Ia juga mampu mengumpulkan informasi, komentar, dan dukungan dari kelompok masyarakat sipil untuk disampaikan kepada komisi-komisi DPR dan kementerian pemerintah. Sementara, Hetifah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam posisi politik pribadi dan kepentingan politik Golkar di parlemen. Ia merasa bahwa koneksi politik yang kuat di partai sangat diperlukan apabila ia ingin bertahan sebagai politisi yang bermanfaat. Kemudian, di tahun 2012, ketika wawancara dilakukan oleh penulis, ia merasa senang karena saat itu ia telah memiliki posisi strategis di DPR, DPP Golkar, serta beberapa organisasi inti Golkar seperti MKGR. Tujuan posisi strategis ini tentu berkorelasi dengan usaha untuk meningkatkan pengaruh politik di dalam DPR. Saat itu, Hetifah mengakui ia semakin berani untuk berkomentar kritis terhadap berbagai isu yang terkait dengan kerjanya di Komisi Infrastruktur dan wilayah dapilnya yaitu Kalimantan Timur tanpa ada kekhawatiran tentang posisi politik yang sudah matang. Seperti halnya Eva, Hetifah juga membuka ruang dan akses politik kepada NGO dan berbagai kelompok lainnya untuk mendiskusikan banyak isu dan membuka dialog dengan anggota DPR lainnya. Terakhir, Nursyahbani juga melakukan hal yang sama di tahun 2004-2009 dengan membuka akses kepada semua NGO untuk memasukkan pesan dan komentar kepada parlemen. Bahkan ia mengakui bahwa akses informasi terkait dengan rencana legislasi untuk memudahkan perubahan penting telah ia bantu buka manakala ia duduk sebagai anggota komisi legislasi.

Di rentang tahun 2004-2009, Eva dan Nursyahbani menggalang jejaring personal di DPR untuk isu-isu strategis seperti UU Kewarganegaraan daripada memanfaatkan KPPRI yang memiliki struktur organisasi yang tidak fleksibel. Namun untuk saat ini, Eva dikenal sebagai anggota DPR yang memiliki kepekaan terhadap isu toleransi dan HAM yang kuat seperti dalam pembelaannya di kasus GKI Yasmin dan kelompok Ahmadiyah (Jakarta Post, 23 April 2012; Jakarta Globe, 26 Desember 2011). Sementara itu, kehadiran Hetifah di Komisi Infrastruktur adalah penting manakala, menurutnya, tidak banyak politisi perempuan yang mampu mengawasi berbagai isu

pembangunan infrastruktur secara dekat. Apalagi sebagian besar anggota komisi ini memiliki relasi yang kuat dengan berbagai pengusaha infrastruktur.

Sebagai penutup, para aktivis perempuan ini telah melakukan banyak perubahan sosial dan politik di dalam partai politik dan parlemen. Meskipun sebagian diantara mereka menyadari ada banyak kendala struktural, kultural dan politik (lihat Tremblay, 2007) dalam berinteraksi di dalam partai politik dan parlemen, namun semua aktivis perempuan ini tetap berkomitmen untuk berada di jalur politik. Oleh karenanya, para aktivis perempuan yang tidak terpilih melakukan banyak aktivitas pengembangan gender di dalam dan di luar partai politik, sementara aktivis perempuan terpilih berkontribusi untuk membuka akses dan kontak dengan pembuat kebijakan. Sementara dari sisi partai politik, Golkar, PDIP, PPP dan PKB sudah mulai terbuka dalam menerima dan menjalankan program keterwakilan perempuan di internal partai dikaitkan dengan program gender mereka.

Rekomendasi Politik Perempuan

Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk formal-deskriptif representasi yang diulas lebih dalam oleh Schwindt-Bayer (2010) dengan kategorisasi representasi perempuan (formal, deskriptif, substantif, dan simbolis). Berbagai perubahan dalam sistem pemilu yang salah satunya menjamin upaya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen setelah reformasi 1998 adalah argumen dari formal-deskriptif representasi di Indonesia. Namun demikian, Schwindt-Bayer berpandangan bahwa substantif representasi juga penting dilihat manakala perempuan dapat beraksi atas nama perempuan di berbagai aktivitas lembaga legislatif. Maka, kehadiran dan pengalaman Eva Sundari, Hetifah, dan Nursyahbani sebagai anggota DPR dapat membuktikan makna representasi perempuan di parlemen dan pengaruh mereka terhadap isu perempuan secara luas. Namun demikian, berbagai pandangan serta pendapat dari para aktivis perempuan di dalam studi ini mengindikasikan bahwa terjadi interseksi antara kebutuhan partai politik dalam pemenuhan aturan hukum tentang kuota gender dan motivasi personal para kandidat untuk melakukan pengembangan peran mereka di partai. Maka dari itu, para kandidat perempuan ini dapat diterima sebagai caleg dimungkinkan karena adanya hubungan personal

dan undangan khusus dari pemimpin partai kepada mereka. Pengaruh informal (Cheng & Tavits, 2009) ini ternyata menjadi langkah efektif untuk dapat memastikan nominasi para aktivis perempuan ini dapat dilacak dengan mudah. Sayangnya, partai politik secara organisasi belum memandang bahwa merekrut aktivis perempuan dapat meningkatkan jumlah suara pemilih dan kursi mereka di DPR. Alasannya sederhana saja bahwa para aktivis perempuan ini bukanlah figur populer dan memiliki pendukung yang kuat di daerah pemilih, terkecuali Eva Sundari. Maka tidaklah heran bila tim seleksi partai politik dapat mudah memindahkan dapil para aktivis perempuan ini meskipun mereka mendapat restu dari pimpinan partai.

Artikel ini telah menunjukkan bahwa ada tiga peran penting yang dilakukan oleh aktivis perempuan di partai politik (Kunovich & Paxton, 2005) yaitu elite partai politik, kandidat pemilu dan kandidat terpilih. Ketiga peran ini menggarisbawahi bahwa aktivis perempuan dapat meningkatkan kesempatan politik dalam representasi perempuan di masing-masing partai politik dengan melakukan ketiga hal tersebut secara simultan. Menjadi elit partai adalah penting untuk memfasilitasi berbagai perubahan kebijakan partai yang mendukung representasi perempuan di partai tersebut dan juga hal yang sama di parlemen. Ratna dan Eva mengambil posisi elite partai ini dengan mendaftarkan para perempuan potensial di PDIP dan di luar partai untuk pencalonan pemilu 2009. Binny juga melakukan aktivitas yang hampir sama manakala ia memimpin pusat kaderisasi partai untuk mendidik kader partai dan memenangkan program partai Golkar. Orientasi untuk bertahan sebagai elite politik yang memiliki dukungan organisasi formal di dalam partai juga langkah penting bagi Hetifah dan Ratu Dian di Golkar agar dapat melakukan program gender di DPR dan di partai mereka sendiri. Dini juga melakukan hal yang sama dengan membantu para elite perempuan PPP dalam berkomunikasi dengan media massa. Sementara Nursyahbani terlibat dalam upaya penyelesaian konflik yang rumit di tubuh PKB sebagai salah seorang pucuk pimpinan.

Selanjutnya, ketika para aktivis perempuan ini telah menjadi caleg dan kemudian terpilih, maka para aktivis perempuan ini diharapkan dapat memberikan dua hasil yang berbeda. Pertama, mereka membawa aspirasi dari organisasi masyarakat sipil sebelumnya, sebagai mitra kerja, ke dalam proses pemilu. Kedua, mereka menyuarakan dan mengadvokasi tuntutan komunitas dan konstituen dari berbagai kelompok

ke dalam arena pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini program kerja kampanye dan tawaran kontribusi program adalah bentuk aspirasi yang siap dibawakan oleh kandidat perempuan di parlemen apabila mereka berhasil meraih kursi. Berbagai NGO dan organisasi gerakan perempuan seperti LBH APIK dan KPI melakukan aktivitas ini terhadap beberapa caleg perempuan yang mereka dukung. Sementara itu, pengalaman Dini yang tidak didukung penuh oleh organisasi asalnya dalam pemenangan pemilu adalah contoh bahwa tidak semua organisasi masyarakat sipil mendukung pencalonan anggotanya dalam pemilu. Meskipun demikian, ketika para perempuan ini terpilih sebagai anggota DPR ataupun sebagai politisi, aktivis NGO dan kelompok gerakan sosial lainnya tetap membutuhkan peran perempuan ini untuk mengadvokasi atau mendorong isu dan kepentingan kelompok mereka di parlemen. Oleh karenanya, pengalaman para perempuan ini menyimpulkan sebuah ironi dalam politik. Aktivis perempuan bertarung secara personal dan tanpa dukungan organisasi NGO atau kelompok masyarakat sipil lainnya untuk memenangkan kursi parlemen; namun setelah aktivis perempuan ini terpilih, organisasi ini meminta dukungan dan bantuan akses politik dalam menegakkan agenda kepentingan mereka. Maka hubungan antara aktivis perempuan yang sudah berpindah ke partai politik dengan organisasi NGO asalnya atau kelompok masyarakat sipil lainnya tidaklah berdasarkan sebuah kesepakatan yang terlembagakan, namun bersifat personal dan tanpa ikatan.

Berdasarkan pengalaman para aktivis perempuan ini dalam dua pemilu 2004 dan 2009, tulisan ini dapat melihat potensi adanya pengalaman yang sama untuk pemilu 2014 dan selanjutnya. Meskipun sistem pemilu proporsional terwakili dengan daftar terbuka tetap dilanjutkan dan melemahkan keterpilihan perempuan di setiap partai, namun kepatuhan terhadap kuota gender dalam pencalonan di daftar kandidat semakin diperkuat dalam sistem pemilu yang akan datang (Mahkamah Konstitusi, 12 Maret 2014). Oleh karenanya, tantangan bagi caleg perempuan tidak lagi dalam penempatan nomor urut di daftar kandidat, melainkan upaya untuk memaksimalkan jumlah suara pemilih bagi caleg perempuan untuk memperoleh kursi parlemen. Apalagi sebagian besar caleg perempuan, termasuk para aktivis dalam studi ini, dikenal tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai dan dukungan logistik kampanye yang tidak maksimal.

Di samping juga caleg perempuan lemah dalam mengorganisasikan jaring politik di dalam dan di luar partainya. Kalaupun ada berbagai koalisi di kelompok masyarakat sipil dan partai politik untuk mendukung keterwakilan perempuan seperti KPI, KPP RI, dan KPPI, koalisi-koalisi ini belum mampu mengorganisasikan jaringan politik perempuan. Maka agenda penting bagi upaya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen di pemilu yang akan datang adalah membangun gerakan sistematis untuk membantu para caleg perempuan dapat mengatasi persoalan-persoalan di atas.

Untuk mendukung gerakan sistematis tersebut, tulisan ini melihat ada dua kemungkinan jalan yang bisa diambil yaitu jalan informal antara elite perempuan di partai politik dengan aktivis perempuan di berbagai kelompok masyarakat sipil dan jalan formal kelembagaan dengan berbagai koalisi yang ada. Jalan informal dapat dilakukan manakala para aktivis perempuan yang sudah mapan sebagai elite partai mampu merekrut potensial kader partai dari kelompok masyarakat sipil. Perekrutan ini tentunya adalah bersifat informal dan personal. Artinya para aktivis perempuan ini dapat bertindak sebagai "headhunters" dalam mengajak aktor gerakan perempuan untuk masuk partai politik dalam melakukan perubahan kebijakan. Jalan ini mungkin dilakukan manakala hubungan informal dan personal antara elite politik dengan aktivis gerakan telah terbangun dengan baik. Sementara itu jalan formal melalui kelembagaan berbagai koalisi adalah memanfaatkan kerjasama antara internal dan eksternal koalisi untuk meningkatkan jumlah perempuan di partai politik. KPI (dari kelompok masyarakat sipil) memberi peluang bagi anggotanya untuk bergabung ke partai politik yang difasilitasi oleh KPPI (kelompok partai). Setelahnya berbagai agenda dan program kaderisasi perempuan dibangun untuk mendukung kemenangan calon perempuan di pemilu mendatang. Dua jalan ini dapat dilakukan terpisah namun juga bisa dilakukan secara simultan. Namun yang terpenting dalam output kedua jalan ini adalah terjadinya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu.

Penutup

Tulisan ini menghadirkan cerita pengalaman para aktivis perempuan dalam memenangkan kursi DPR di tahun 2004 dan 2009. Sebagian besar diantara mereka gagal dan tetap berkontribusi terhadap

pengembangan partai politik, terutama dalam menggalakkan isu gender. Sementara bagi yang terpilih, agenda penting yang mereka lakukan adalah bagaimana membuka akses politik kepada para aktivis NGO dan memperjuangkan isu dan kepentingan mereka di dalam pembuatan kebijakan di DPR. Artinya ketujuh perempuan ini telah membuktikan bahwa kehadiran mereka di dalam partai politik dan DPR tetap penting dan berwarna, meskipun belum mampu menghasilkan luaran yang memiliki dampak secara luas. Namun demikian, usaha untuk memenuhi kuota 30 persen di lembaga DPR tersebut tetap harus dikembangkan secara intensif manakala secara aturan formal sudah semakin dikuatkan. Agenda penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mengisi dan memanfaatkan peluang keterwakilan perempuan tersebut dengan berbagai pengembangan kapasitas personal perempuan di partai politik dan organisasi masyarakat sipil untuk kemudian disiapkan mengisi pencalonan di setiap partai. Dengan demikian, apabila semakin banyak jumlah perempuan yang memiliki kapasitas memadai sebagai kandidat dalam pemilu, maka semakin besar pula peluang keterpilihan perempuan untuk mendapatkan kursi di DPR. Apabila lembaga DPR diisi oleh politisi yang memiliki kompetensi representasi, legislasi dan anggaran, maka kehidupan demokrasi di Indonesia akan jauh lebih baik.

Daftar Pustaka

- Campo, E. d. (2005). Perspectives and Limits of the Institutional Aspects of Women's Political Representation. *Social Forces* , 83 (4), pp.1697-1726.
- Cheng, C., & Tavits, M. (2011). Informal influences in selecting female political candidates. *Political Science Quarterly* , 64 (2), pp.460-471.
- Franceschet, S. (2001). Women in politics in post-transitional democracies: The Chilean case. *International Feminist Journal of Politics* , 3 (2), pp.207-236.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Gerring, J. (2007). *Case study research: principles and practices*. New York: Cambridge University Press.
- Jakarta Globe. (2011, Desember 26). Indonesia: A bad year for religious rights.
- Jakarta Post. (2012, April 23). Eva Kusuma Sundari: Defending pluralism.
- Krook, M. L. (2006). Reforming representation: The diffusion of candidate gender quotas worldwide. *Politics & Gender* , 2, pp.303-327.
- Kunovich, S., & Paxton, P. (2005). Pathways to power: the role of political parties in women's national political representation. *The American Journal of Sociology* , 111 (2), pp.505-552.

- Mahkamah Konstitusi (2014, Maret 12). MK kabulkan judicial review soal nomor urut dan keterpilihan caleg perempuan. Diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9709>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). Cultural Obstacles to Equal Representation. *Journal of Democracy*, 12 (3), pp.126-140.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1993). 'If only more candidates came forward': Supply-side explanations of candidate selection in Britain. *British Journal of Political Science*, 23 (3), pp.373-408.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford and New York: Clarendon Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. California and London: University of California Press.
- Pitre, S. (2003). Women's struggle for legislative power: The role of political parties. *Atlantis*, 27 (2), pp.102-109.
- Schwindt-Bayer, L. A. (2010). *Political Power and Women's Representation in Latin America*. New York: Oxford University Press.
- Schwindt-Bayer, L. A., & Mishler, W. (2005). An Integrated Model of Women's Representation. *The Journal of Politics*, 67 (2), pp.407-428.
- Tremblay, M. (2007). Democracy, representation, and women: A comparative analysis. *Democratization*, 14 (4), pp.533-553.
- _____. (2008). Introduction. Dalam M. Tremblay, *Women*

and legislative

representation: electoral systems, political parties and sex quotas (pp. 1-22). New York: Palgrave Macmillan.

Catatan Belakang

- 1 Artikel ini merujuk indikator latar belakang sosial dan ambisi kekuasaan perempuan dari Schwindt-Bayer (2011) untuk melihat bagaimana peran politisi perempuan dalam kompetisi pemilu. Norris (1997; dikutip dari Pitre 2003) berpendapat bahwa motivasi politik adalah penting untuk melihat alasan kandidat dalam menominasikan dirinya. Norris dan Lovenduski (1993) menjelaskan motivasi lain yaitu kepentingan dan ambisi. Indikator dampak posisi politik perempuan adalah ingin melihat urgensi keterlibatan perempuan dalam politik seperti yang disampaikan oleh Anna Philips (1995).
- 2 Menurut Nursyahbani, Taufik Kiemas pernah menawarkan dirinya untuk bergabung ke PDIP. Taufik berusaha meyakinkannya bahwa ayahnya memiliki hubungan dekat dengan Sukarno dan menjadi anggota PNI. Nursyahbani menolak tawaran Taufik karena telah ada beberapa anggota pengurus LBH APIK aktif di PDIP. Sementara ayah Binny juga dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional dan aktif di PDIP dan Binny sendiri telah memutuskan untuk bergabung dengan Golkar karena memiliki misi yang sama dengan partai ini.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"	iii-iv
Artikel / Articles	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i>	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i>	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i>	103-115
<i>Shelly Adelina & Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i>	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i>	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i>	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i>	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
Wawancara / Interview	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i>	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	165-166
Profil / Profile	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja?	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i>	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

